

ABSTRAK

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta menjaga dan mempertahankan keamanan dan pertahanan negara baik warga biasa maupun anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, setelah bubarnya Dwifungsi ABRI dan berpisahnya TNI dan Polri membuat institusi tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, TNI fokus terhadap pertahanan negara sedangkan Polri khusus menangani masalah keamanan negara dan sebagai pelayan publik di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, Perbandingan dan Konseptual dan menggunakan sumber bahan hukum yang jelas. Dengan tujuan menganalisa apakah kedudukan TNI dan Polri pada jabatan sipil termasuk kedalam pelanggaran norma atau tidak ada pelanggaran norma yang terjadi.

Hasil penelitian ini adalah regulasi kedudukan TNI dan Polri dalam kelembagaan negara terhadap perspektif *good governance* dimana kedua Undang-Undang tersebut perlu adanya penjelasan terkait kedudukan, fungsi dan tugas dari kedua institusi. Diperlukan penyusunan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai peran dan batasan TNI dan Polri dalam jabatan sipil. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi antara institusi militer, kepolisian, dan lembaga sipil, serta untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik efisien, efektif dan positif di Indonesia.

Kata Kunci: Regulasi-Kedudukan-*Good Governance*

ABSTRACT

The Constitution mandates that every citizen is obliged to participate in maintaining and maintaining state security and defense, both ordinary citizens and members of the Indonesian National Army or the Indonesian National Police, after the dissolution of the Dual Function of the Indonesian Armed Forces and the separation of the TNI and the National Police, the institution has different duties and functions, the TNI focuses on state defense while the National Police specifically handles state security issues and as public servants in the community.

The research method used is Normative. The approach taken is a legislative, comparative and conceptual approach and uses clear sources of legal materials. With the aim of analyzing whether the position of the TNI and the National Police in civilian positions is included in the violation of norms or no violation of norms has occurred.

The result of this study is the regulation of the position of the TNI and the National Police in state institutions from the perspective of good governance where the two laws need an explanation related to the position, functions and duties of the two institutions. It is necessary to prepare clearer and firmer regulations regarding the roles and limitations of the TNI and the National Police in civilian positions. This is to prevent the overlap of functions between military institutions, police, and civilian institutions, as well as to ensure that all actions taken are in accordance with the principles of good governance in order to create good, efficient, effective and positive governance in Indonesia

Keywords: Regulation – Position – Good Governance